



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar lampiran	xiv
Intisari	xv
Abstract	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Kepustakaan dan Kerangka Teori	6
1. Tinjauan Kepustakaan	6
a. Birokrasi dalam Perspektif Historis	6
b. Birokrasi dalam Prespektif Kultural	9
c. Bureaucratic Polity	12
d. State Corporatism	14
2. Kerangka Teori	16
a. Perubahan Sosial	17
1. Sistem Sosial	20
2. Sistem Ekonomi	27
3. Sistem Politik	35
a. Birokrasi : pemegang kekuasaan atau alat kekuasaan ..	37
b. Pentingnya variasi sistem	39
4. Sistem Pemerintahan	43
b. Birokrasi Responsif atau Tidak Responsif.....	44
c. Perkembangan Historis Birokrasi di Indonesia	45
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Metode dan Metodologi Penelitian	53
B. Metodologi Penelitian	54
C. Pendekatan Deskriptif – kualitatif	55
D. Rasionalistik	56
E. Phenomenologi – Naturalistik	58
F. Konstruktivitisme	59
G. Ruang Lingkup Metode Penelitian	60
1. Sumber Data	60
2. Variabel Penelitian	63



	3. Konseptualisasi Variabel	64
	4. Definisi Operasional Variabel	66
	5. Model Geometris Penelitian	70
	6. Lokasi Penelitian	71
	7. Teknik Pengambilan Sampel	72
	8. Teknik Analisa Data	73
BAB III	DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	75
A.	Kondisi Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	75
1.	Pemerintahan	76
2.	Kependudukan dan Tenaga Kerja	78
3.	Dimensi Sosial dan Ekonomi	78
B.	Kondisi Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto	80
1.	Pemerintahan	81
2.	Kependudukan dan Tenaga Kerja	82
3.	Dimensi Sosial dan Ekonomis	83
BAB IV	PERKEMBANGAN BIROKRASI DALAM KONFIGURASI SISTEM SOSIAL PERIODE PRA KOLONIAL.....	86
A.	Sistem Pemerintahan <i>Autokrasi</i> Majapahit	86
1.	Struktur dan Fungsi Pemerintahan	88
2.	Pola Birokrasi <i>Stable</i> (Tradisional)	99
3.	Hubungan Pusat dan Daerah	103
a.	Sistem Pengawasan	103
b.	Sistem Penarikan Pajak	105
c.	Sistem upeti	106
B.	Sistem Politik Tradisional – Autokrasi Majapahit	107
1.	Struktur Kekuasaan	111
2.	Sistem Status	118
C.	Sistem Ekonomi Tradisional – <i>Manor</i> Majapahit	122
1.	Sektor Pertanian	123
2.	Liberalisasi Sektor Perdagangan	126
3.	Liberalisasi Komoditas	130
4.	Mekanisme Pasar	133
5.	Sektor Industri	135
BAB V	PERKEMBANGAN BIROKRASI DALAM KONFIGURASI SISTEM SOSIAL PERIODE KOLONIAL	141
A.	Sistem Pemerintahan Campuran Hindia Belanda	141
1.	Struktur Pemerintahan Pusat dan Daerah	141
a.	Sistem Pemerintahan Sebelum RR 1854	142
b.	Sistem Pemerintahan Setelah RR 1854	145
2.	Pola Birokrasi Campuran Hindia Belanda	152
3.	Hubungan Pusat dan Daerah	157
a.	Sistem Pengawasan	159
b.	Sistem Perpajakan	160

B. Sistem Politik Campuran Hindia Belanda	161
1. Struktur Kekuasaan	165
2. Sistem Status	172
C. Sistem Ekonomi Pra- Kapitalis Hindia Belanda	179
1. Liberalisasi Sektor Perdagangan	180
2. Liberalisasi Komoditas	187
3. Peran Negara dan Pasar	189
a. Kebijaksanaan Struktur Keuangan Hindia Belanda	190
b. Kebijaksanaan Penetapan Struktur Harga	193
c. Kebijaksanaan Penetapan Struktur Produksi	194
d. Kebijakan Sistem Perbankan	195
1. Sistem Kredit Bukan Bank (<i>Non of Financial Forms of credit System</i>)	205
2. Sistem Kredit Pemerintah	206
D. Sistem Pemerintahan Totaliter Pendudukan Jepang	210
1. Struktur dan Fungsi Pemerintahan	210
2. Pola Birokrasi <i>Stable</i> pendudukan Jepang	213
E. Sistem Politik Totaliter Penduduk Jepang	217
1. Struktur Kekuasaan	219
2. Sistem Status	224
F. Sistem Ekonomi Komando Pendudukan Jepang	229
1. Peran Negara dan Pasar	231
a. Liberalisasi Sektor Perdagangan	232
b. Kebijakan Struktur Produksi dan Harga	232
c. Kebijakan Struktur Keuangan dan Sistem Perbankan	236

BAB VI PERKEMBANGAN BIROKRASI DALAM KONFIGURASI SISTEM SOSIAL PERIODE PASCA KOLONIAL	241
A. Sistem Pemerintahan Totaliter Orde Lama	241
B. Hubungan Pusat dan Daerah	253
1. Sistem Pengawasan	254
2. Keuangan Daerah	255
C. Pola Birokrasi <i>Stable</i> Orde Lama	258
D. Sistem Politik Totaliter Orde Lama (1945-1965)	259
1. Struktur Kekuasaan	260
2. Sistem Status	265
E. Sistem Ekonomi Kapitalis – Semu Orde Lama	266
1. Peran Negara dan Pasar 1949-1966	267
2. Kebijakan Struktur Keuangan dan Struktur Harga	267
3. Kebijakan Struktur Produksi	274
F. Sistem Pemerintahan Totaliter Orde Baru (1967-1998)	276
1. Struktur dan Fungsi Pemerintah	277
2. Pola Birokrasi <i>Stable-Regulated</i> Orde Baru	283
a. Sistem Internal Birokrasi	287
b. Sistem Eksternal Birokrasi	291



3. Hubungan Pusat dan Daerah	294
a. Sistem Pengawasan	296
b. Sistem Keuangan Daerah	297
G. Sistem Politik Totaliter Orde Baru (1966-1998)	301
1. Pemusatan Kekuasaan Pada Satu Tangan (Presiden)	306
2. Militer (ABRI)	309
3. Birokrasi Pemerintahan	318
4. Sistem Kepartaian Indonesia dalam Konteks Historis	325
H. Sistem Ekonomi Kapitalis-Semu Orde Baru (1966-1998)	332
1. Peran Negara dan Pasar	338
a. Kebijakan Struktur Keuangan dan Struktur Perbankan ...	338
b. Kebijakan Struktur Produksi	347
c. Kebijakan Struktur Jaminan dan Pengetahuan.....	351
I. Kesimpulan Perkembangan Birokrasi dalam Konfigurasi Sistem Sosial	353
 BAB VII. HUBUNGAN PERUBAHAN SOSIAL DAN RESPON BIROKRASI : STUDI KASUS PERTANAHAN	361
A. Responsivitas Birokrasi Pertanahan Orde Baru	362
1. Responsivitas Sistem Pelayanan Petanahan	363
2. Responsivitas Individu (Aparat) Terhadap Pelayanan Pertanahan	379
3. Responsivitas Penyelenggaraan Manajemen Struktur Birokrasi Pertanahan	386
B. Hubungan Responsivitas Birokrasi Dengan Perubahan Sosial ..	390
C. Pola Birokrasi Kondusif Terhadap Perubahan Sosial	392
 BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN	398
A. Hubungan Responsivitas Birokrasi Terhadap Perubahan Sosial	398
B. Pola Birokrasi Kondusif Terhadap Perubahan Sosial	402
C. Saran – Saran	403
 DAFTAR PUSTAKA	407
 DAFTAR LAMPIRAN	414